

## **BAB II.**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Manajemen Lingkungan**

Manajemen lingkungan adalah aspek-aspek dari keseluruhan fungsi manajemen (termasuk perencanaan lingkungan) yang menentukan dan membawa pada implementasi kebijakan lingkungan (BBS 7750, dalam ISO 14001 oleh Sturm, 1998). Sedangkan dalam Manajemen Lingkungan bisa dikatakan sebagai suatu kerangka kerja yang dapat diintegrasikan ke dalam proses-proses bisnis yang ada untuk mengenal, mengukur, mengelola dan mengontrol dampak-dampak lingkungan secara efektif, dan oleh karenanya merupakan resiko-resiko lingkungan (Purwanto, 2000).

Menurut Supardi (2003), lingkungan atau sering juga disebut lingkungan hidup adalah jumlah semua benda hidup dan benda mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati. Secara umum lingkungan adalah segala sesuatu disekitar subyek manusia yang terkait dengan aktifitasnya. Elemen lingkungan adalah hal-hal yang terkait dengan: tanah, udara, air, sumberdaya alam, flora, fauna, manusia, dan hubungan antar faktor-faktor tersebut.

Menurut Purwanto (2000) berdasarkan cakupannya manajemen lingkungan dalam 2 macam yaitu:

- a. *lingkungan internal* yaitu di dalam lingkungan pabrik / lokasi fasilitas produksi. Yaitu yang termasuk didalamnya kondisi lingkungan kerja, dampak yang diterima oleh karyawan dalam lingkungan kerjanya, fasilitas kesehatan, APD, asuransi pegawai, dll.
- b. *lingkungan eksternal* yaitu lingkungan di luar lokasi pabrik / fasilitas produksi. Yaitu segala hal yang dapat menimbulkan dampak pada lingkungan disekitarnya, termasuk masyarakat di sekitar lokasi pabrik, dan pihak yang mewakilinya (Pemerintah, pelanggan, investor/pemilik). Aktifitas yang terkait yaitu komunikasi dan hubungan dengan masyarakat, usaha-usaha penanganan pembuangan limbah ke saluran umum, perhatian pada keseimbangan ekologis dan ekosistem di sekitar pabrik, dll.

### 1.2.1 Konservasi Sumber Daya Alam

Konservasi sumber daya alam merupakan upaya pelestarian alam yang dikelola secara seksama dan bijaksana yang berdasarkan pada asas pelestarian alam. Sumber daya alam adalah unsur-unsur hayati yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) dengan unsur non hayati di sekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. (KEHATI, 2000).

Menurut Setiawan, (2014) sumber daya alam adalah isi yang terkandung dalam biosfer, sebagai sumber energi potensial, baik yang tersembunyi di dalam litosfer (tanah), hidrosfer (air), maupun atmosfer (udara) yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia secara langsung. Sedangkan Herman Haeruman dalam Setiawan, (2014) menyatakan bahwa sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alami misalnya tanah, air, dan perairan, biodata, udara, dan ruang, mineral, bentang alam (*lanscape*), panas bumi dan gas bumi, angin, pasang surut dan arus laut.

Dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang bukan dibuat manusia, dan yang terdapat di permukaan bumi, baik itu berada di dalam tanah, laut, ataupun air, dan di udara yang dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung (Setiawan, 2014).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Lebih dalam bahwa konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam (hayati) dengan pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan

persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya.

Adapun pengertian Sumber Daya Alam menurut UU No. 32 tahun 2009 diartikan sebagai "unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem". Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan komponen alam termasuk manusia di dalamnya merupakan bagian dari sumber daya alam yang menyatu dan saling terkait satu sama lain. Sumber daya alam yang ada di Indonesia secara legal dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Upaya konservasi penting dilakukan sebagai tanggung jawab manusia dalam hal pengelolaan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang dan juga untuk generasi yang akan datang. Keberlangsungan bumi tergantung pada bagaimana masyarakat dunia memanfaatkan, mengelola, dan menjaganya. Mengapa demikian, sebab keberadaan bumi semakin hari semakin terdegradasi, daya dukungnya semakin menurun akibat eksploitasi manusia.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan: a. perlindungan sistem penyangga kehidupan; b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

### **1.2.2 Sasaran Konservasi**

Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi yaitu (BKSDA Jatim, 2000) :

- a) Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan).
- b) Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan.

- c) Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi, polusi dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).

### 1.2.3 Tujuan dan Manfaat Konservasi

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Tujuan tersebut tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Tujuan konservasi (Dwidjoseputro, 1994) meliputi :

- a) Preservasi yang berarti proteksi atau perlindungan sumber daya alam terhadap eksploitasi komersial, untuk memperpanjang pemanfaatannya bagi keperluan studi, rekreasi dan tata guna air.
- b) Pemulihan atau restorasi, yaitu koreksi kesalahan-kesalahan masa lalu yang telah membahayakan produktivitas pengkalan sumber daya alam.
- c) Penggunaan yang seefisien mungkin. Misal teknologi makanan harus memanfaatkan sebaik-baiknya biji rambutan, biji mangga, biji salak dan lain-lainnya yang sebetulnya berisi bahan organik yang dapat diolah menjadi bahan makanan.
- d) Penggunaan kembali (*recycling*) bahan limbah buangan dari pabrik, rumah tangga, instalasi-instalasi air minum dan lain-lainnya. Penanganan sampah secara modern masih ditunggu-tunggu.
- e) Mencarikan pengganti sumber alam yang sepadan bagi sumber yang telah menipis atau habis sama sekali. Tenaga nuklir menggantikan minyak bumi.

- f) Penentuan lokasi yang paling tepat guna. Cara terbaik dalam pemilihan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan secara optimal, misalnya pembuatan waduk yang serbaguna di Jatiluhur, Karangates, Wonogiri, Sigura-gura.
- g) Integrasi, yang berarti bahwa dalam pengelolaan sumber daya diperpadukan berbagai kepentingan sehingga tidak terjadi pemborosan, atau yang satu merugikan yang lain. Misalnya, pemanfaatan mata air untuk suatu kota tidak harus mengorbankan kepentingan pengairan untuk persawahan.

Pada dasarnya konservasi merupakan suatu perlindungan terhadap alam dan makhluk hidup lainnya. Sesuatu yang mendapat perlindungan maka dengan sendiri akan terwujud kelestarian.

Manfaat-manfaat konservasi diwujudkan dalam (KEHATI, 2000) dengan:

- a) Terjaganya kondisi alam dan lingkungannya, berarti upaya konservasi dilakukan dengan memelihara agar kawasan konservasi tidak rusak.
- b) Terhindarnya bencana akibat perubahan alam, yang berarti gangguangangguan terhadap flora fauna dan ekosistemnya pada khususnya serta sumber daya alam pada umumnya menyebabkan perubahan berupa kerusakan maupun penurunan jumlah dan mutu sumber daya alam tersebut.
- c) Terhindarnya makhluk hidup dari kepunahan, berarti jika gangguangangguan penyebab turunnya jumlah dan mutu makhluk hidup terus dibiarkan tanpa upaya pengendalian akan berakibat makhluk hidup tersebut menuju kepunahan bahkan punah sama sekali.
- d) Mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan baik mikro maupun makro, berarti dalam ekosistem terdapat hubungan yang erat antara makhluk hidup maupun dengan lingkungannya.
- e) Mampu memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, berarti upaya konservasi sebagai sarana pengawetan dan pelestarian flora fauna merupakan penunjang budidaya, sarana untuk mempelajari flora fauna yang sudah punah maupun belum punah dari sifat, potensi maupun penggunaannya.

- f) Mampu memberi kontribusi terhadap kepariwisataan, berarti ciri-ciri dan obyeknya yang karakteristik merupakan kawasan ideal sebagai saran rekreasi atau wisata alam.

## 1.2 Pariwisata

Pariwisata adalah salah satu industri gaya baru, yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan (Salah Wahab, 2003).

Sedangkan menurut Hunziaker dan K. Krapf dalam (Muhammad Ilyas, 2009), pariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal di situ untuk melakukan suatu pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara.

Sektor pariwisata berperan penting dalam rangka pengembangan ekonomi kemasyarakatan, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan mikro industri, menambah lapangan kerja baru, serta menjaga kelestarian adat-istiadat suatu kawasan wisata. Dengan tumbuhnya keadaan pariwisata secara tidak langsung akan menumbuhkan pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan kepariwisataan. Jasa wisata akan berkembang misalnya, sektor usaha transportasi, sektor akomodasi (hotel, motel, *homestay*, pondok wisata, dan perkemahan). Selain itu disisi lain kawasan oleh-oleh baik makanan, minuman, dan kerajinan tangan *handycraf* akan berkembang sebagai penunjang kekhasan suatu kawasan pariwisata.

Pariwisata juga berperan dalam meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Dengan berpindahnya wisatawan dari suatu daerah ke daerah lain dalam waktu tertentu akan menurunkan tingkat ketegangan syaraf pada otak. Wisatawan akan merasakan relaksasi dari segi keadaan tempat, pemandangan alam, dan keheningan dalam kenyamanan. Berpariwisata membuat wisatawan menjadi gembira, sejenak melupakan rutinitas kerja yang memberikan tekanan. Hal tersebut menurunkan resiko sakit stress.

Dalam Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata (*tourism*) atau kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Adanya interaksi lintas sektor menyebabkan pengembangan pariwisata menjadi begitu kompleks. Namun, dari berbagai sektor tersebut akan menumbuhkan keterkaitan satu sama lain yang saling menunjang, sehingga perekonomian dapat berkembang dengan pesat.

### **2.2.1 Daerah Tujuan Wisata**

Daerah tujuan wisata juga menempati bagian ruang wilayah yang sangat luas, mencakup dari satu wilayah administrasi pemerintahan, memiliki sejumlah daya tarik wisata yang menarik, mampu menawarkan beragam kegiatan pariwisata yang unik, memiliki akses yang tinggi dengan daerah tujuan wisata yang lain sehingga membentuk jaringan DTW (Purwanto, 2014). Daerah tujuan wisata yang ideal harus memiliki daya tarik wisata, mempunyai cukup fasilitas, menawarkan atraksi/wisata, menyediakan sesuatu yang dapat dibeli (Suwena dan Widyatmaja 2010).

Gunn (1988) dalam Warpani (2007) menyebutkan bahwa definisi Daya Tarik Wisata adalah “sesuatu” yang ada di lokasi destinasi atau/tujuan pariwisata yang tidak hanya menawarkan/menyediakan sesuatu bagi wisatawan untuk dilihat dan dilakukan, tetapi menjadi magnet penarik seseorang untuk melakukan perjalanan. Ciri utama daya tarik wisata adalah tidak dapat dipindahkan dan untuk menikmatinya wisatawan harus datang ke tempat tersebut.

Wisatawan yang melakukan perjalanan ke daerah tujuan wisata (DTW) memerlukan berbagai kebutuhan dan pelayanan mulai dari keberangkatan sampai kembali ke tempat tinggalnya. Aktivitas pariwisata sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari. Sama seperti yang kita lakukan setiap hari. Wisatawan juga butuh makan dan minum, tempat menginap, serta alat transportasi yang

membawanya pergi dari suatu tempat ke tempat lainnya (Suwena dan Widyatmaja 2010).

Cooper *et al.* (1993) dalam Suwena dan Widyatmaja (2010) menyebutkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan pelayanan tersebut, daerah tujuan wisata harus didukung oleh keempat komponen utama atau yang dikenal dengan istilah “4A” yaitu : a) Atraksi (*attraction*); b) Amenitas; c) Aksesibilitas; d) Pelayanan Tambahan (*ancillary services*). Uraian dari masing-masing komponen tersebut dijelaskan sebagai berikut :

**a) Atraksi (*attraction*)**

Ada banyak alasan mengapa orang berwisata ke suatu daerah. Beberapa yang paling umum adalah untuk melihat keseharian penduduk setempat, menikmati keindahan alam, menyaksikan budaya yang unik, atau mempelajari sejarah budaya daerah tersebut. Intinya, wisatawan datang untuk menikmati hal-hal yang tidak dapat mereka temukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Atraksi di sebut juga obyek dan daya tarik wisata, merupakan komponen yang signifikan dalam menarik wisatawan (Suwena dan Widyatmaja 2010).

Modal kepariwisataan mengandung potensi untuk dikembangkan menjadi atraksi wisata, sedangkan atraksi wisata itu sudah tentu harus komplementer dengan motif perjalanan wisata. Oleh karena itu untuk menemukan potensi kepariwisataan di suatu daerah orang harus berpedoman pada apa yang dicari wisatawan. Terdapat tiga modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan, yaitu :

1. *Natural resources* (alami)
2. Atraksi budaya
3. Atraksi buatan

**b) Amenitas (Sarana dan Prasarana)**

Suwena dan Widyatmaja (2010) menjelaskan, secara umum pengertian amenitas adalah segala macam prasarana dan sarana yang diperlukan oleh wisatawan



selama berada di daerah tujuan wisata. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti :

1. Akomodasi (penginapan) adalah tempat di mana wisatawan bermalam untuk sementara di suatu daerah wisata.
2. Usaha makanan dan minuman merupakan salah satu komponen pendukung penting. Wisatawan akan kesulitan apabila tidak menemukan fasilitas ini pada daerah yang dikunjungi.
3. Transportasi dan Infrastruktur. Wisatawan memerlukan alat transportasi baik itu transportasi udara, laut dan darat untuk mencapai daerah wisata yang menjadi tujuannya. Prasarana (infrastruktur) yaitu semua hasil konstruksi fisik, baik yang di atas maupun di bawah tanah, yang diperlukan sebagai pembangunan. Sedangkan sarana (suprastruktur) adalah pemanfaatan prasarana dengan membangun apa saja yang sifatnya khusus (khusus hotel, khusus perdagangan, khusus lapangan golf. Dengan menggunakan prasarana yang cocok dibangunlah sarana-sarana pariwisata seperti hotel, atraksi wisata, marina, gedung pertunjukkan, dsb. Adapun prasarana yang diperlukan untuk pembangunan sarana-sarana pariwisata ialah jalan, persediaan air, tenaga listrik, tempat pembuangan sampah, bandara, pelabuhan, telepon, dll.

Prasarana pariwisata merupakan fasilitas yang memungkinkan proses kegiatan pariwisata berjalan dengan lancar sehingga dapat memudahkan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan berwisata.

**c) *Aksesibilitas* (Akses jalan)**

Jalan masuk atau pintu masuk utama ke daerah tujuan wisata merupakan akses penting dalam kegiatan pariwisata. Bandara, pelabuhan, terminal dan segala macam jasa transportasi lainnya menjadi akses penting dalam pariwisata. Di sisi lain akses ini diidentikkan dengan transferabilitas yaitu kemudahan untuk bergerak dari daerah satu ke daerah lainnya. Tanpa adanya kemudahan transferabilitas tidak akan ada pariwisata. Adapun faktor-faktor yang memungkinkan transferabilitas ialah :

1. Konektivitas antar daerah yang satu dengan daerah yang lain. Konektivitas atau hubungan antar daerah itu ada kaitannya dengan determinan perjalanan wisata yaitu komplementaris antara motif perjalanan dengan atraksi wisata.
2. Tidak adanya penghalang yang merintanginya adanya transferabilitas antar daerah
3. Tersedianya sarana angkutan antar daerah.

d) **Pelayanan tambahan**

Pelayanan tambahan atau sering disebut juga pelengkap yang harus disediakan oleh pemerintah daerah dari suatu daerah tujuan wisata, baik untuk wisatawan maupun pelaku pariwisata (Suwena dan Widyatmaja 2010). Pelayanan yang disediakan termasuk : pemasaran, pembangunan fisik (jalan raya, rel kereta, air minum, listrik, telepon, dll) serta mengakomodir segala macam aktivitas dan dengan peraturan perundang-undangan baik di obyek wisata maupun di jalan raya.

Suantoro (1997) dalam Suwena dan Widyatmaja (2010) menerangkan bahwa pembangunan obyek wisata harus dirancang dengan bersumber pada potensi daya tarik yang dimiliki obyek tersebut dengan mengacu pada kriteria keberhasilan pengembangan yang meliputi berbagai kelayakan, yaitu :

1. Kelayakan finansial

Studi kelayakan ini, menyangkut perhitungan secara komersial dari pembangunan obyek wisata tersebut. Perkiraan untung rugi sudah harus diperkirakan dari awal.

2. Kelayakan sosial ekonomi regional

Studi kelayakan ini dilakukan untuk melihat apakah investasi yang ditanamkan untuk membangun suatu obyek wisata juga akan memiliki dampak sosial ekonomi regional serta menciptakan lapangan pekerjaan/kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan devisa dan lain-lain.

3. Kelayakan teknis

Pembangunan obyek wisata harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dengan melihat daya dukung yang ada.

4. Kelayakan Lingkungan

Analisis dampak lingkungan dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan pembangunan suatu obyek wisata. Pembangunan obyek wisata bukanlah untuk merusak lingkungan, tetapi sekedar memanfaatkan sumber daya alam untuk kebaikan manusia dan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

### **2.2.2 Pariwisata Alam Berkelanjutan**

Pariwisata alam merupakan konsep wisata yang menunjukkan alam sebagai daya tarik utama wisata. Atraksi alam yang akan dijual sebagai tontonan yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Wisata alam terdiri dari wisata pantai (*marine tourism*), wisata etnik (*etnik tourism*), wisata cagar alam (*ecotourism*), wisata buru, dan wisata agro.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan selain harus menjamin aspek keberlanjutan juga harus terkait dengan aspek pendidikan dan partisipasi lokal. Jaminan keberlanjutan ini tidak hanya multi sustainable dari aspek lingkungan tetapi juga sosial, budaya dan ekonomi. Paradigma baru ini mengedepankan keterbukaan, pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan ekonomi kerakyatan disamping pelestarian lingkungan (Fandeli & Nurdin, 2005).

Tiga pilar pembangunan berkelanjutan sejak deklarasi Stockholm 1972 menuju Rio de Janeiro 1992, sampai dengan Rio+10 di Johannesburg 2002 ditekankan perlunya koordinasi dan integrasi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam setiap pembangunan nasional dengan pendekatan kependudukan, pembangunan dan lingkungan sampai dengan integrasi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang menjadi pertimbangan (Fandeli, 2012).

Pariwisata alam dapat dipandang sebagai simbiosis mutualisme antara konservasi dan pembangunan ekonomi, namun sebenarnya dapat berkontribusi pada hilangnya keanekaragaman hayati dalam ekosistem yang rapuh. Pariwisata dapat mempengaruhi lingkungan langsung, melalui pengembangan infrastruktur seperti restoran dan hotel, tetapi juga secara tidak langsung dapat memperkenalkan ke masyarakat luar mengenai daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi atau relatif dilindungi (Mejía, 2014).

Pertumbuhan yang signifikan dalam sektor pariwisata telah menciptakan tantangan utama dalam perencanaan, pengelolaan lingkungan dan lanskap situs pariwisata. Hal ini disebabkan kebutuhan untuk menyediakan situs wisata yang menarik dan mendukung aksesibilitas seperti akomodasi dan jaringan transportasi serta perlindungan lingkungan (Samat & Harun, 2013).

### **2.3. Ekowisata**

Ekowisata merupakan bentuk pariwisata yang berfokus pada menyusuri alam dan menekankan daya tariknya pada pelestarian lingkungan (Bjork dalam Chiu, 2014). Ekowisata memiliki hubungan yang kuat dengan pariwisata berkelanjutan. Keberlanjutan itu tergantung pada hubungan antara pariwisata dan lingkungan. Pengelolaan yang baik dalam pengembangan ekowisata merupakan hal yang penting untuk melestarikan dan menjaga kekayaan hayati daerah serta meningkatkan ekonomi masyarakat setempat (Bunruamkaew, 2011).

Menurut *The International Ecotourism Society* atau TIES (1991), Ekowisata adalah perjalanan wisata ke wilayah-wilayah alami dalam rangka mengkonservasi atau menyelamatkan lingkungan dan memberi penghidupan penduduk lokal. Ekowisata dapat dikatakan sebagai motor penggerak dalam prinsip-prinsip konservasi, hal ini mengacu pada pengembangan ekowisata berdasarkan kaidah-kaidah konservasi. Dengan demikian ekowisata sangat tepat dan berdayaguna dalam mempertahankan keaslian dan keutuhan ekosistem di areal yang masih alami. Sehingga dengan adanya ekowisata akan meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan.

Adapun menurut Fandeli, (2002), ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggungjawab terhadap kelestarian area yang masih alami (*natural area*), memberi manfaat ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Dari definisi ini ekowisata dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni sebagai (1) produk, (2) pasar, dan (3) pendekatan pengembangan. Sebagai produk, ekowisata merupakan semua atraksi yang berbasis pada sumberdaya alam. Sebagai pasar, ekowisata merupakan perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan. Akhirnya sebagai pendekatan pengembangan, ekowisata merupakan metode pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata secara ramah lingkungan. Di sini kegiatan wisata yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan sangat ditekankan dan merupakan ciri khas ekowisata. Pihak yang berperan penting dalam ekowisata bukan hanya wisatawan tetapi juga pelaku wisata lain (*tour operatour*) yang memfasilitasi wisatawan untuk menunjukkan tanggungjawab tersebut (Damanik & Weber, 2006).

Ekowisata merupakan salah satu bentuk kegiatan minat khusus. Bentuknya yang khusus ini menjadikan ekowisata sering diposisikan sebagai lawan dari wisata massal. Berbeda dengan wisata konvensional, ekowisata merupakan kegiatan wisata yang menaruh perhatian besar terhadap kelestarian sumber daya pariwisata. Masyarakat ekowisata internasional mengartikan sebagai perjalanan wisata alam yang bertanggungjawab dengan cara mengkonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Damanik & Weber, 2006).

Menurut Choy dalam Fandeli & Nurdin (2005), ekowisata diberi batasan sebagai bentuk dan kegiatan wisata yang bertumpu pada lingkungan dan bermanfaat secara ekologi, sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal serta bagi kelestarian SDA dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Lima aspek utama untuk berkembangnya ekowisata adalah : (1) adanya keaslian lingkungan alam dan budaya, (2) keberadaan dan dukungan masyarakat, (3) pendidikan dan pengalaman, (4) keberlanjutan dan (5) kemampuan manajemen dalam mengelola ekowisata.

Ekowisata dikatakan Fandeli (2002), mempunyai nilai penting bagi konservasi dikarenakan ada beberapa hal antara lain:

- a. memberikan nilai ekonomi yang dapat digunakan untuk program konservasi di daerah yang dilindungi.
- b. memberikan nilai ekonomi bagi daerah yang mempunyai tujuan kegiatan konservasi pada daerah yang dilindungi.
- c. dapat mengembakan konstituen yang mendukung konservasi baik tingkat lokal, nasional dan internasional.
- d. menimbulkan penambahan pendapatan secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat disekitar lokasi ekowisata.
- e. mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan
- f. mengurangi ancaman terhadap keanekaragaman hayati.

*The Ecotourism Society* (dalam Fandeli, 2002) terdapat delapan prinsip yang bila dilaksanakan maka ekowisata menjamin pembangunan *ecological friendly* dari pembangunan berbasis kerakyatan yakni :

1. mencegah dan menanggulangi dampak dari aktifitas wisatawan terhadap alam dan budaya yang disesuaikan dengan sifat dan karakter alam dan budaya setempat;
2. pendidikan konservasi lingkungan, mendidik wisatawan dan masyarakat setempat akan pentingnya arti konservasi;
3. pendapatan langsung untuk kawasan, mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelola kawasan pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan;
4. partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pengawasan;
5. keuntungan secara nyata terhadap ekonomi masyarakat;
6. menjaga keharmonisan dengan alam;
7. pada umumnya lingkungan alam mempunyai daya dukung lebih rendah dengan daya dukung kawasan buatan; dan
8. peluang penghasilan pada porsi yang besar terhadap negara.

Pengusahaan ekowisata sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Kawasan Suaka Margasatwa,

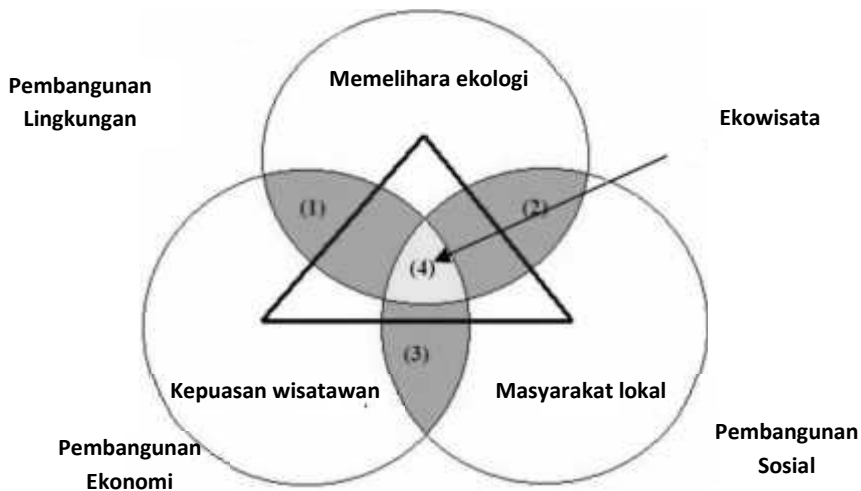
Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam, dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, memberikan dampak positif dalam menciptakan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan negara dan pemasukan devisa.

Ekowisata yang dikembangkan oleh Hashim, (2015) dalam pariwisata berkelanjutan di Pulau Langkawi Malaysia menunjukkan bahwa, dalam aspek politik melalui intervensi pemerintah telah meningkatkan tingkat sosio-ekonomi. Dengan adaptasi situasi dan memanfaatkan lanskap pulau tersebut, penduduk setempat dapat meningkatkan aspek sosial ekonomi dengan cara memanfaatkan jasa lingkungan Pulau Langkawi. Penduduk setempat dan pemerintah daerah, melalui kerjasama politik, dapat menuai keuntungan lebih lanjut melalui ekowisata tanpa mengorbankan keunikan pulau, latar belakang budaya masyarakat dan alam.

Pengembangan ekowisata harus dilaksanakan secara holistik dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dalam kata lain, setiap upaya untuk mengembangkan ekowisata harus melibatkan masyarakat lokal, sehingga mereka dapat menjadi subyek pembangunan, dan bukan hanya objek pasif (Situmorang & Mirzanti, 2012).

### **2.3.1 Ekowisata Sebagai Pariwisata Berkelanjutan**

Pariwisata berkelanjutan adalah penyelenggaraan pariwisata bertanggungjawab yang memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini, tanpa mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa mendatang, dengan menerapkan prinsip-prinsip, layak secara ekonomi (*economically feasible*) dan lingkungan (*environmentally feasible*), diterima secara sosial (*socially acceptable*) dan tepat guna secara teknologi (*technologically appropriate*) (Alimudin, 2010). Pendekatan pariwisata berkelanjutan disajikan pada Gambar 2 (France 1997 dalam Beeler 2000).



Gambar 2. Ekowisata Sebagai Suatu Strategi Wisata dan Pembangunan Berkelanjutan (Beeler, 2000)

Berdasarkan Gambar 2, kegiatan ekowisata adalah sebagian dari pariwisata berkelanjutan. Ini berarti bahwa pariwisata berkelanjutan lebih luas dari ekowisata, mencakup sektor-sektor pendukung kegiatan wisata secara umum. Saling keterkaitan yang dijelaskan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut (Beeler, 2000):

1. Menunjukkan sejumlah wisatawan yang berkunjung pada suatu lingkungan alami. Agen perjalanan biasanya elit lokal atau multinasional, dimana profit usaha wisata rasanya sulit masuk ke masyarakat lokal.
  2. Biasanya wisma tamu skala kecil setempat memberikan kenyamanan di bawah standar dalam pelayanan. Pemukiman penduduk lokal biasanya memperoleh manfaat langsung dari dampak lingkungan yang buruk.
  3. Banyak usaha wisata mempekerjakan penduduk lokal sebagai tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan khusus (*unskilled labor*). Secara ekonomi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, akan tetapi selalu dengan dampak lingkungan yang tinggi.
  4. Titik keseimbangan yang memungkinkan antara ketiga aspek yang secara lokal dapat dikelola dan manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat
- Adapun menurut United Nations dalam Samat dan Harun, (2013) pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah didasarkan pada tanggung jawab



pemerintah dan semua pemangku kepentingan di sektor pariwisata untuk memastikan agar tercapai kemakmuran jangka panjang dan kualitas hidup generasi mendatang serta tidak menempatkan pada bahaya. Industri pariwisata memiliki potensi untuk menghasilkan devisa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan dan memperkuat hubungan antar sektor yang berbeda di negara ini. Berbagai produk baik alam dan buatan manusia termasuk situs sejarah dan warisan, pantai, pemandangan indah, dan taman hiburan, pertemuan, lokakarya, konferensi dan pameran serta olahraga telah dikembangkan untuk menarik wisatawan di seluruh dunia.

### **2.3.2 Atraksi Wisata**

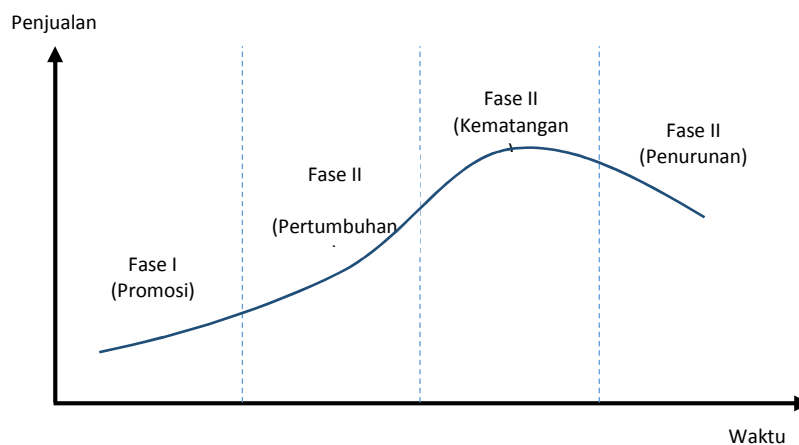
Di dalam perencanaan pengembangan pariwisata dikenal berbagai teori atau konsep, salah satunya adalah konsep *product driven* yang lebih menitik beratkan pada pengembangan produk wisata (Fandeli, 2002). Produk wisata dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijual sebagai komoditas pariwisata, terdiri dari potensi flora, fauna, bentang alam dan atraksi buatan berupa seni dan budaya masyarakat (Muttaqin, dkk, 2011).

Daya Tarik Wisata sebagai produk wisata didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Seluruh komponen yang ada dalam suatu ODTWA diharapkan dapat menjadi atraksi.

Menurut Sackley (1996) dalam Fandeli (2002), suatu destinasi terdapat beberapa atraksi dari kekayaan alam (*natural attraction*) dan sebagian atraksi buatan (*man made attraction*). Disamping itu dapat dikemas pula, atraksi dari *living culture* atau kehidupan masyarakat yaitu sistim bermasyarakat, adat istiadat dan budaya yang terdapat dalam kehidupan. Atraksi yang dikelola sebagai atraksi untuk *primary destination* akan berbeda dengan *secondary destination*. Untuk dapat menciptakan atraksi yang menarik, dibedakan pengelolaannya antara atraksi

dengan nuansa setempat (*insitu*) biasanya alam dan pembenahan sesuai keinginan wisatawan bagi atraksi buatan (Fandeli, 2002).

Produk daya tarik wisata alam akan mengalami pasang surut dalam penjualannya atau yang dikenal dengan istilah daur hidup produk ekowisata (*ecotourism life cycle product*). Konsep ini dirujuk berdasarkan keadaan realitas yang terjadi, bahwa wisatawan memiliki tingkat kejenuhan dalam menikmati produk wisata alam (Fahmi, 2011).



Gambar 3. Daur hidup produk wisata alam  
Sumber : Fahmi (2011)

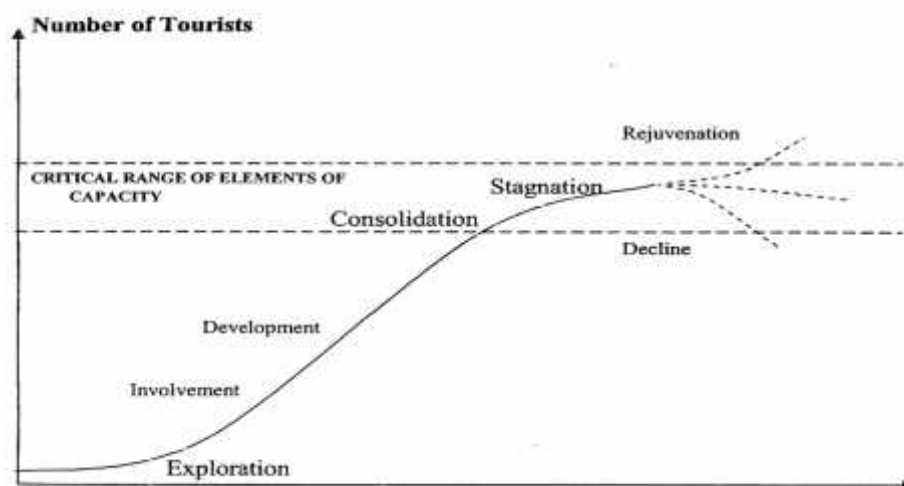
Dari Gambar 3 dapat dipahami bahwa daur hidup produk wisata alam bersifat fluktuatif, seiring dengan perkembangan waktu dan bentuk pengelolaannya. Adapaun setiap fase tersebut meliputi :

- a. Fase I yaitu masa perkenalan suatu *stakeholder* pengelola dalam meluncurkan produk wisata alam ke pasaran yang ditandai dengan proses pengenalan produk dari segi jenis dan kualitas sehingga dapat melihat apresiasi pengunjung terhadap produk itu sendiri.
- b. Fase II merupakan masa pertumbuhan, di mana produk wisata alam telah masuk ke pasar dan mendapat perhatian, ditandai dengan adanya ketertarikan terhadap produk dan berlanjut kepada masyarakat yang lain.
- c. Fase III adalah masa produk wisata telah mencapai kematangan, masyarakat telah mengenal produk wisata dari segi jenis dan kualitas serta memberikan

memory di dalam benak mereka sehingga ada keinginan untuk melakukan kunjungan lagi.

- d. Fase IV adalah masa penurunan penjualan produk wisata alam, yaitu fase dimana masyarakat sudah mulai merasa jenuh terhadap produk wisata alam sehingga mengharuskan pengelola untuk melakukan antisipasi dampak penurunan kunjungan wisatawan yang semakin parah.

Sedangkan menurut Buttler dalam Pitana (2005), siklus destinasi wisata yang dapat menggambarkan proses pengembangan sebuah kawasan yang menjadi tujuan wisata akan mengalami beberapa interpretasi sesuai dengan Gambar 4 berikut ini:



Gambar 4. Model Hipotesis Siklus Hidup Destinasi Wisata  
Sumber : Butler (1980)

Siklus hidup area wisata mengacu pada pendapat Buttler dalam Pitana (2005) terbagi atas tujuh fase yaitu:

- 1) Pertama, tahapan *exploration* yang berkaitan dengan *discovery* yaitu suatu tempat sebagai potensi wisata baru ditemukan baik oleh wisatawan, pelaku pariwisata, maupun pemerintah, biasanya jumlah pengunjung sedikit, wisatawan tertarik pada daerah yang belum tercemar dan sepi, lokasinya sulit dicapai namun diminati oleh sejumlah kecil wisatawan yang justru menjadi minat karena belum ramai dikunjungi.
- 2) Kedua, *involvement phase* (keterlibatan). Pada fase ini, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mengakibatkan sebagian masyarakat lokal mulai

menyediakan berbagai fasilitas yang memang khusus diperuntukkan bagi wisatawan. Kontak antara wisatawan dengan masyarakat lokal masih tinggi dan masyarakat mulai mengubah pola-pola sosial yang ada untuk merespon perubahan ekonomi yang terjadi. Di sinilah mulai suatu daerah menjadi suatu destinasi wisata yang ditandai oleh mulai adanya promosi.

- 3) Ketiga, *development phase* (pembangunan). Pada fase ini, investasi dari luar mulai masuk serta mulai munculnya pasar wisata secara sistematis. Daerah semakin terbuka secara fisik, advertensi (promosi) semakin intensif, fasilitas lokal sudah tersisih atau digantikan oleh fasilitas yang benar-benar *touristic* dengan standar internasional, dan atraksi buatan sudah mulai dikembangkan untuk menambahkan atraksi yang asli alami. Berbagai barang dan jasa impor menjadi keharusan termasuk tenaga kerja asing untuk mendukung perkembangan pariwisata yang pesat.
- 4) Keempat, *consolidation phase* (konsolidasi). Pada fase ini, peristiwa sudah dominan dalam struktur ekonomi daerah dan dominasi ekonomi ini dipegang oleh jaringan internasional atau *major chains and franchise*. Jumlah kunjungan wisatawan masih naik tetapi pada tingkat yang lebih rendah. Pemasaran semakin gencar dan diperluas untuk mengisi berbagai fasilitas yang sudah dibangun. Fasilitas lama sudah mulai ditinggalkan.
- 5) Kelima, *stagnation phase* (stagnasi). Pada fase ini, kapasitas berbagai faktor sudah terlampaui di atas daya dukung sehingga menimbulkan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kalangan industri sudah mulai bekerja keras untuk memenuhi kapasitas dari fasilitas yang dimiliki khususnya dengan mengharapkan *repeater guests* atau wisata konvensi/bisnis. Selain itu, atraksi buatan sudah mendominasi atraksi asli alami (baik budaya maupun alam), citra awal sudah mulai meluntur, dan destinasi sudah tidak lagi populer.
- 6) Keenam, *decline phase* (penurunan). Pada fase ini, wisatawan sudah beralih ke destinasi wisata baru atau pesang dan yang tinggal hanya 'sia-sia', khususnya wisatawan yang hanya berakhir pekan. Banyak fasilitas pariwisata sudah berlatih atau dialihkan fungsinya untuk kegiatan non-pariwisata, sehingga destinasi semakin tidak menarik bagi wisatawan. Partisipasi lokal

mungkin meningkat lagi terkait dengan harga yang merosot turun dengan melemahnya pasar. Destinasi bisa berkembang menjadi destinasi kelas rendah (*a tourism slum*) atau sama sekali secara total kehilangan diri sebagai destinasi wisata.

- 7) Ketujuh, *rejuvenation phase* (peremajaan). Pada fase ini, perubahan secara dramatis bisa terjadi (sebagai hasil dari berbagai usaha dari berbagai pihak) menuju perbaikan atau peremajaan. Peremajaan ini bisa terjadi karena adanya inovasi dalam pengembangan produk baru dan menggali atau memanfaatkan sumber daya alam dan budaya yang sebelumnya belum dimanfaatkan. Siklus hidup pariwisata tersebut secara visual.

## 2.4 Daya Dukung Wisata

Pertama kali pengertian daya dukung dipakai dalam ilmu ekologi. Daya dukung yang diterjemahkan dari kata *carrying capacity* menurut konsep ekologi adalah jumlah maksimum individu unsur hayati dapat berupa tumbuhan dan hewan yang masih dapat dijamin hidup dengan baik pada kondisi lingkungan tertentu (Colinvaux.1986) dalam Fandeli (2002).

Secara alami dalam suatu lingkungan, pengertian daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perilaku manusia dan makhluk hidup yang lain secara wajar. Istilah daya dukung kemudia dirubah dengan daya tampung bagi lingkungan binaan. Daya tampung adalah kemampuan suatu lingkungan binaan untuk menampung jumlah individu maksimum.

Kualitas lingkungan akan menentukan kualitas kepuasan wisatawan. Douglas (1979) dalam Fandeli (2002) memberikan definisi tentang daya dukung tempat wisata yaitu jumlah wisatawan yang menggunakan suatu areal untuk berwisata yang masih dapat didukung oleh areal tersebut dengan ditandai tanpa adanya perubahan pada kualitas wisata. Kualitas wisata merupakan tingkat yang normal dari suatu area wisata agar wisatawan dapat merasakan kenyamanan dari aspek psikologis dan kesegaran dari aspek jasmani. Dari definisi tersebut dapat digolongkan suatu kawasan wisata mempunyai kualitas wisata tinggi bila menyebabkan wisatawan sangat nyaman, dan sebaliknya. Maka daya dukung

pariwisata adalah daya dukung biogeofisik dan sosial-ekonomi dan budaya dari suatu lokasi dan atau tapak (tujuan wisata) dalam menunjang kegiatan pariwisata tanpa menimbulkan penurunan kualitas lingkungan dan kepuasan wisatawan dalam menikmati lokasi dan tapak wisata.

#### **2.4.1 Klasifikasi Daya Dukung Wisata**

Daya dukung lingkungan wisata alam terdiri dari beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan kondisi fisik, ekologis, ekonomi serta sosial. Lingkungan fisik alami suatu kawasan wisata mempunyai kemampuan fisik dalam menampung beban terutama dari kehadiran wisatawan

Daya dukung fisik (*Physical Carrying Capacity*) menurut Cifuentes (1992) dalam Ortega, *et.al.* (2011) merujuk pada batas maksimum dari kunjungan, yang secara fisik bisa dilakukan dalam satu hari. Ini didefinisikan oleh hubungan antara jam kunjungan areal wisata dan waktu yang diperlukan untuk setiap kunjungan, ruang kunjungan tersedia, ruang yang diperlukan bagi pengunjung dan tipe jalur/ *treck* (melingkar atau linier).

Selain itu perlu mempertimbangkan daya dukung ekologis sebagai faktor pemulihan atau *natural recovery* atau *natural purification* yang diperkenalkan oleh Douglass (1975) yang menemukan beberapa aktifitas wisata yang menimbulkan usikan atau cekaman terhadap lingkungan.

Selanjutnya perlu memperhatikan nilai daya dukung riilnya (*Real Carrying Capacity/RCC*) yaitu nilai daya dukung fisik yang telah dikoreksi dengan faktor-faktor pembatas lingkungan (aspek fisik, biologis) yang mempengaruhi batas maksimum pengunjung yang secara fisik dapat diterima oleh lingkungan. Peran manajemen pengelola juga turut mempengaruhi daya dukung riil dalam memberikan pelayanan yang maksimal sehingga meningkatkan daya dukung efektif (*Effective Carrying Capacity/ECC*). Nilai daya dukung efektif ini mewakili jumlah maksimum pengunjung yang diperbolehkan berada pada situs area wisata untuk keperluan umum dimana merupakan nilai daya dukung riil yang dikaitkan dengan kapasitas manajemen. Sedangkan menurut Douglas (1975) dalam Fandeli (2002), areal seperti halnya hutan yang dikembangkan untuk wisata dapat dikunjungi, tanpa menimbulkan kerusakan dengan 2 (dua)

wisatawan setiap hari per arce atau 5 (lima ) orang wisatawan setiap hari perhektar.

Terkait dengan daya dukung psikologis, menurut Fandeli & Nurdin (2009), menyatakan bahwa kepuasan pegunjung dapat didekati dengan menetapkan daya dukung fisik (*physical carrying capacity*) dari daya dukung psikologis (*psychologis carrying capacity*). Selanjutnya, daya dukung psikologis dapat diketemukan dengan melakukan survey terhadap wisatawan tentang luas area yang dibutuhkan untuk suatu kegiatan tertentu agar wisatawan masih dapat memperoleh kepuasan.

Zacarias, *et al.* (2011) melakukan studi di Pantai Praia de Faro sebagai daerah dalam upaya untuk menilai jumlah optimum dari orang yang harus diperbolehkan tanpa membahayakan sekitar lingkungan ekologi, sosial dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek fisik-ekologi daya dukung harus antara 1385 dan 2628 pengunjung / hari dengan dampak penerimaan maksimum kurva menjadi 305 dan 608 wisatawan (bagi masyarakat lokal dan wisatawan asing). Meskipun ada perbedaan yang signifikan antara daya dukung fisik-ekologi dan sosial-budaya, penelitian ini menunjukkan bahwa tercatat aspek fisik-ekologis dapat diterapkan untuk pengelolaan ekosistem, sementara daya dukung sosial budaya dapat diatasi ketika tujuan pengelolaan adalah wisatawan dan pantai yang digunakan.

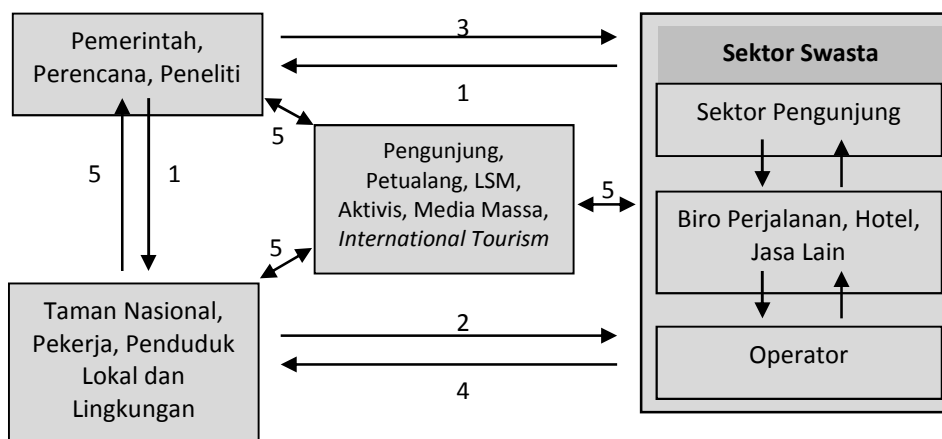
## **2.5 Stakeholder Ekowisata**

Sinergi pertemuan budaya yang berbeda antara latar belakang wisatawan dengan masyarakat lokal disekitar ekowisata harus dapat dipelihara melalui dukungan dari pemerintah. Kondisi ini diharapkan dapat menumbuhkan situasi kondusif bagi beroperasinya sektor swasta dan bantuan dari kelompok nirlaba. Sedangkan perbedaan persepsi pada masing-masing *stakeholder* dapat menimbulkan konflik (Nugroho, 2011).

Kesepahaman fungsi pada masing-masing *stakeholder* dapat dibangun dari persepsi perihal manfaat dan kerugian dari kegiatan ekowisata. Nilai manfaat dimunculkan dari motivasi pada masing-masing aspek. Dari aspek ekonomi,

motivasi berupa tambahan penghasilan, kesempatan kerja dan pengembangan kewirausahaan. Aspek sosial menumbuhkan motivasi berupa pengembangan kemasyarakatan, mengembangkan identitas sosial, perbaikan kualitas hidup. Sementara motivasi aspek lingkungan meliputi konservasi warisan budaya dan lingkungan, manfaat kesehatan lingkungan, pendidikan dan ketrampilan lingkungan.

*Stakeholder* perlu berkomitmen kuat sesuai kemampuan, perang dan fungsi masing-masing dalam rangka merealisasikan motivasi dan memberikan manfaat serta mengurangi kerugian lingkungan. Menurut Nugroho (2011), deskripsi fungsi, aliran dan keterkaitan masing-masing *Stakeholder* di dalam kegiatan ekowisata dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 5. Hubungan *stakeholder* pada sektor ekowisata

Keterangan :

1. = kebijakan
2. = pengunjung dan manfaat ekonomi
3. = pajak atau saran kebijakan
4. = partisipasi dan kenyamanan
5. = saran kebijakan)

Sumber: Nugroho (2011)

## 2.6 Persepsi dan Partisipasi

Persepsi wisatawan diperlukan untuk memprediksi dampak dari tindakan-tindakan tertentu atau untuk memberikan saran berguna tentang cara meningkatkan fasilitas yang ada. Pengembangan destinasi wisata salah satunya



menggunakan pendekatan persepsi/karakter pasar yang berhubungan dengan persepsi wisatawan terhadap komponen destinasi wisata yang termasuk aspek psikografi termasuk didalamnya adalah motivasi, persepsi, ekspektasi dan preferensi wisatawan terhadap jenis produk wisata (Sunaryo, 2013).

Pemanfaatan potensi ekowisata di Taman Nasional akan dapat berjalan maksimal jika dapat menyatukan pengertian dan persepsi *stakeholder* sebagai pihak pengelola dan perencana (Fandeli & Nurdin, 2005). Masing-masing *stakeholder* mempunyai motivasi dan pandangan yang berbeda dalam kegiatan pemanfaatan potensi ekowisata tersebut.

Sedangkan partisipasi merupakan keterlibatan langsung peneliti maupun objek peneliti dalam kegiatan penelitian. Jika objek tersebut adalah masyarakat/kelompok individu maka peneliti harus berbaur dengan yang diteliti (*immersion*) sehingga peneliti dapat mendengar, melihat dan merasakan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh objek yang sedang diteliti. Sebaliknya, objek diarahkan untuk dengan sukarela dengan kesadaran dan pemahaman terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan penelitian (Sarwono, 2006).

Partisipasi masyarakat dalam ekowisata berarti masyarakat lokal memiliki kendali dan keterlibatan dalam pemanfaatan dan pengelolaan ekowisata baik manajemen dan pengembangannya maupun proporsi yang utama menyangkut sisa manfaat di dalam masyarakat (Wulandari & Sumarti, 2011). Partisipasi masyarakat ini lebih lanjut dapat dilakukan guna mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan wisata.

Pengukuran persepsi dan partisipasi dapat dilakukan dengan pengumpulan data dari responden. Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Langkah yang dapat digunakan adalah melalui kuesioner dan wawancara.

Dari studi Mondal, (2013) tentang persepsi penduduk Pulau Sagar, India terdapat efek yang merugikan dari ancaman bahaya lingkungan, setelah diamati ada ancaman erosi, badai, pasang surut, dan banjir yang beraneka ragam di seluruh aktivitas masyarakat atau kelompok. Penggabungan dari beragam pandangan oleh kelompok kerja berbeda dan partisipasi aktif mereka akan

memperkaya manajemen strategi untuk mitigasi bahaya lingkungan di khususnya dan pembangunan sosial ekonomi keseluruhan dari Pulau Sagar secara umum.

## **2.7 Strategi Pengembangan Ekowisata**

Strategi pengembangan merupakan bagian dari perencanaan pariwisata. Menurut Pitana & Diarta (2009), perencanaan menyangkut strategi sebagai implementasi kebijakan merupakan prediksi dan oleh karenanya memerlukan beberapa perkiraan persepsi akan masa depan. Pengembangan destinasi wisata memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat dan harus menggabungkan beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata antara lain, aspek aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran), karakteristik infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi social, keterkaitan/ kompabilitas dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat dan resistensi komunitas lokal.

Kemudian dalam mengembangkan kawasan wisata, penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan (Ramly, 2007). Upaya tersebut tersebut membutuhkan sikap komitmen multipihak dalam bidang-bidang yang menyangkut biogeofisil, sosial, ekonomi, budaya dan politik setempat

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, terdapat 3 (tiga) komponen pelaku usaha dan pemangku kepentingan pengembangan kepariwisataan di Indonesia yaitu:

1. Pertama, pihak Pemerintah baik Pusat dan atau Pemerintah Daerah;
2. Kedua, pihak Swasta/Industri baik yang merupakan investor asing dan ataupun pelaku industri dalam negeri;
3. Ketiga, pihak Masyarakat yang terkait, sebagai tenaga kerja, pelaku kegiatan usaha kepariwisataan.

## **2.8 SWOT.**

Strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan program atau alokasi sumberdaya yang dapat menentukan apakah sebuah organisasi itu, apa yang dikerjakan dan mengapa organisasi melakukan itu. Dengan demikian strategi merupakan perpanjangan dari misi membentuk jembatan antara sebuah organisasi

dengan lingkungannya (Bryson 1999). Tahapan pembuatan strategi merupakan tahapan yang paling menantang sekaligus menarik dalam proses manajemen strategi. Inti dasar tahap ini adalah menghubungkan organisasi dengan lingkungannya dan merupakan strategi yang paling sesuai dengan misi organisasi (Tangkilian, 2004). Proses pembuatan strategi terdiri dari 4 (empat) elemen yaitu:

1. Identifikasi masalah strategik yang dihadapi organisasi.
2. Pengembangan alternatif strategi yang ada
3. Evaluasi dari alternatif
4. Penentuan pemilihan strategi baik dari berbagai alternatif yang tersedia

Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin terjadi dalam mencapai tujuan dari suatu proyek kegiatan organisasi dalam skala yang lebih luas. Untuk keperluan tersebut diperlukan kajian dari aspek lingkungan baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal yang mempengaruhi pola strategi organisasi dalam mencapai tujuan (Rangkuti 2000). Terdapat beberapa metodologi dalam penyusunan SWOT, yaitu:

5. Mengidentifikasi *existing strategy* yang telah ada dalam institusi sebelumnya. Strategi ini bisa jadi bukan merupakan strategi yang disusun berdasarkan kebutuhan institusi menghadapi gejala eksternal yang ada melainkan merupakan strategi turunan yang telah ada sejak alam dipegang oleh institusi.
6. Mengidentifikasi perubahan lingkungan yang dihadapi institusi dan masih mungkin terjadi di masa mendatang.
7. Membuat *cross tabulation* antara strategi yang ada pada saat ini dengan perubahan lingkungan yang ada.
8. Menentukan kategorisasi kekuatan dan kelemahan berdasarkan penilaian apakah strategi yang ada saat ini masih sesuai dengan perubahan lingkungan dimasa mendatang.

Analisis strategi pengembangan potensi ekowisata dilakukan dengan menggunakan metode SWOT. Menurut Stephen P. Robinson dan Mary Coulter dalam Fahmi (2011), dengan mengidentifikasi apa yang penting, maka dapat disusun sebuah rencana strategi dan menjamin bahwa rencana tersebut dapat

dilaksanakan secara efektif. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*) (Rangkuti, 2008). Manfaat penggunaan SWOT dalam penyusunan strategi menurut Fahmi (2011), diantaranya :

1. Mampu memberikan gambaran dari 4 (empat) dimensi : kekuatan (*strengths*), peluang (*opportunities*), kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*) sehingga pengambilan keputusan bisa melihat dari empat dimensi tersebut secara lebih komprehensif.
2. Dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan rencana jangka panjang.
3. Mampu memberikan pemahaman kepada para *stakeholder* dalam satu ikatan komunikasi dan kerjasama.
4. Dapat dijadikan penilaian secara rutin dalam melihat *progress report* dari setiap keputusan yang telah dibuat.

Analisis faktor strategis meliputi analisis faktor internal dan analisis faktor eksternal. Faktor internal mempengaruhi terbentuknya kekuatan dan kelemahan, dalam hal ini menyangkut dengan kondisi fisik ekowisata dan internal lembaga yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan ekowisata. Sedangkan faktor eksternal mempengaruhi terbentuknya peluang dan ancaman, dalam hal ini menyangkut dengan kondisi ekonomi-sosial-budaya masyarakat dan pengunjung yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan ekowisata. Analisis faktor internal dilakukan dengan menggunakan matrik faktor strategi internal (*Internal Strategic Factors Analysis Summary / IFAS*), sedangkan analisis faktor eksternal menggunakan matrik faktor strategi eksternal (*Eksternal Strategic Factors Analysis Summary / EFAS*).

Pembobotan pada lingkungan internal dan eksternal diberikan bobot dan nilai (*rating*) berdasarkan pertimbangan professional. Pembobotan pada lingkungan internal tingkat kepentingannya didasarkan pada besarnya pengaruh faktor strategis terhadap posisi strategisnya, sedangkan pada lingkungan eksternal didasarkan pada kemungkinan memberikan dampak terhadap faktor strategisnya.

Jumlah bobot pada masing-masing lingkungan harus berjumlah = 1 (satu), dengan skala 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting).

Untuk nilai rating berdasarkan besarnya pengaruh faktor strategis terhadap kondisi dirinya dengan ketentuan skala mulai dari 4 (sangat kuat) sampai dengan 1 (lemah). Variabel yang bersifat positif (variabel kekuatan atau peluang) diberi nilai dari 1 sampai dengan 4 dengan membandingkan dengan rata-rata pesaing utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif kebalikannya, jika kelemahan atau ancaman besar (dibanding dengan rata-rata pesaing sejenis) nilainya 1, sedangkan jika nilai ancaman kecil/dibawah rata-rata pesaing-pesaingnya nilainya 4.